

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peran masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Salah satu kiprah warga dalam negara demokrasi ialah partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif pada kehidupan politik, diantaranya dengan jalan memilih pimpinan daerah maupun pemimpin negara serta secara eksklusif maupun tidak langsung.

Partisipasi politik masyarakat yaitu salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang menganut sistem demokrasi, tingkat partisipasi politik juga dapat dijadikan tolak ukur dalam keterlibatan masyarakat di negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan, keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi sendiri kerap didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam artian, peranan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.¹

Partisipasi politik yaitu aktivitas atau kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu, yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik juga termasuk salah satu aspek yang penting, dan ciri khas dalam berdemokrasi. Sebuah keputusan politik yang dibuat dan

¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 367.

dilaksanakan oleh pemerintah, berkaitan erat dan berpengaruh terhadap kehidupan warga negara. Maka dari itu warga negara mempunyai hak yang sama dalam bagian keputusan politik.²

Partisipasi politik yaitu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh suatu rakyat dalam sebuah negara, terkait implementasi kebijakan pemerintah. Hal tersebut juga dapat dilaksanakan oleh perseorangan maupun secara kelompok, secara langsung dan dapat dimobilisasi. Partisipasi politik juga termasuk salah satu indikator penting yang dilakukan oleh rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan pemerintah, kegiatan tersebut dimaksudkan agar dalam penyelenggaraannya tidak terdapat kecurangan yang tidak diharapkan.³ Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu. Besar kecilnya partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas pemilu.⁴

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan

²Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.180.

³Heri Kusmanto, *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, (JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.1 No.1, 2013), h. 41-47.

⁴Agus Sofyan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019*, (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol.8 No.1, 2021), h. 346.

lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaannya sangat kecil maka partisipasi politiknya menjadi pasif dan apatis.⁵

Desa tidak lebih dari sebuah kesatuan masyarakat yang hidup dalam ruang bersama masih sangat bergantung pada alam dan masih terkait erat dengan adat istiadat setempat.⁶ Desa terdapat lembaga desa yang memiliki fungsi menyelenggarakan pemerintahan desa yang disebut juga dengan Eksekutif Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berfungsi sebagai wakil masyarakat desa dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dan mengawasi kegiatan pemerintahan desa juga dikenal sebagai legislatif desa (badan perwakilan desa).⁷BPD beranggotakan pemuka masyarakat di desa dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi masyarakat ditingkat desa.⁸

⁵Siti Qulsum dkk, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026*, (Jurnal Unsil Vol .06 No.02, 2020), h. 103.

⁶Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2016), h.11.

⁷Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2016), h.12.

⁸Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2016), h.14.

Desa berhak untuk menyelenggarakan pesta demokrasi, untuk pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan kegiatan politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi berjalan di desa. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades bukan hanya tentang perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa, tetapi lebih dari itu adalah tentang gengsi, harga diri dan kehormatan, untuk bertahan di berbagai daerah.⁹

Demokrasi desa berupa pemilihan kepala pemerintahan desa terus diterapkan di Indonesia hingga sekarang. Demokrasi yang berlangsung sejak lama juga telah menetapkan pemilihan kepala desa sebagai pemilihan dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pemilihan umum lainnya. Perbedaan ini terwujud dalam pelaksanaan Pilkades yang mungkin berbeda dengan pemilihan umum lainnya. Pilkades tidak secara resmi dikaitkan dengan partai, berbeda dengan Pilkada kasasi dan pemilihan presiden yang membutuhkan dukungan.¹⁰

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Pilkades merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu di desa, karena pilkades merupakan ajang penentuan siapa yang akan merebut posisi juara di desa sebagai wadah untuk menampung aspirasi

⁹Neneng Yuni dan Valina Singka, *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional Dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*, (Jurnal Politik, Vol.1 No.2, 2016), h. 2.

¹⁰Elwan La Ode, *Model Dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa*, (Journal Publicuho Vol.1 No.4, 2019), h. 2.

politik masyarakat sekaligus sebagai sarana untuk menggantikan atau melanjutkan pemerintahan desa. Pilkades diharapkan dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat di desa tersebut dengan mengangkat calon-calon yang layak menjadikepala desa.¹¹

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai dari dibentuknya Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia Pemilihan bertugas menyelenggarakan proses pilkades yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih. Dikarenakan Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pilkades disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹²

Kepala Desa merupakan orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina, dan mengembangkan desanya. Dengan adanya kepala desa, diharapkan desa tersebut akan maju, berkembang, dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat

¹¹Bayu Sunaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h.92.

¹²Ahmad Averus dan Dinda Alfina, *Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa*, (Jurnal Moderat Vol.6 No.03, 2020), h.587.

ataupun pemerintah sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik.¹³

Secara umum, tugas pokok dari pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya penerapan prinsip otonomi desa dalam upaya untuk dapat membentuk suatu bentuk kehidupan masyarakat desa yang lebih demokratis dalam suatu proses perumusan kebijakan desa, dan juga dalam upaya untuk memberikan suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih berkualitas kepada seluruh komponen masyarakat desa setempat.¹⁴

Oleh karena itu, pemerintahan desa dikaitkan dengan upaya percepatan terwujudnya pemerintahan desa yang mandiri sebagai nilai-nilai inti kehidupan masyarakat sejak dulu, maka dari itu pemerintahan desa khususnya (Kepala desa dan perangkat desa lainnya) tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar dan tugas yang sangat berat untuk mewujudkan bentuk kehidupan pemerintahan dan masyarakat desa yang demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hakiki demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mempercepat penciptaan dan pelaksanaan proses sumbangan layanan sipil dan publik.¹⁵

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan kepala desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pilkades, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi dari pihak manapun. Bagi sebagian

¹³Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), h. 1.

¹⁴Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015), h.33.

¹⁵Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015), h.34.

masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui melalui tim sukses nya dengan membagikan kaos, dan stiker serta adanya tekanan dari para pembotoh atau pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para pembotoh tersebut memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para pembotoh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara. Selain itu ada sebagian masyarakat lainnya yang memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon. Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa.¹⁶

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia dimasa mendatang. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang lazim di laksanakan di tiap-tiap desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian Pemimpin Desa. Kepala Desa merupakan Pemimpin dari Pemerintahan Desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

¹⁶Marselina Kareth, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung*, (Jurnal Ilmu Politik Vol.3 No.1, 2016), h. 2.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu pesta demokrasi. Masyarakat Desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa sangat penting karena mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.¹⁷

Desa Marindal I merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Patumbak. Partisipasi politik di Desa Marindal I dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena pemilih yang telah diberi hak pilihnya justru tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 22.000 jiwa yang berhak memilih, namun pada saat dilakukan pemungutan suara di 44 TPS yang menggunakan hak suaranya hanya 6.459 suara atau sekitar 29%, dan masih terdapat banyak masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji dan menganalisis lebih mendalam apa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Marindal I Kecamatan Patumbak dalam Pemilihan kepala Desa Tahun 2022.

¹⁷Siti Qulsum, dkk, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026*, (Jurnal Unsil Vol .06 No.02, 2020), h. 103-104.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1). Bagaimana Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022?
- 2). Apa saja faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1). Untuk mengetahui Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022.
- 2). Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu ataupun pengetahuan mengenai kajian partisipasi politik.

- 2) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti, khususnya bagi masyarakat serta aparat di Desa Marindal I.
- 3) Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

E. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Maka batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1) Partisipasi Politik

Partisipasi Politik yaitu sebuah aktivitas atau tindakan secara individu ataupun kelompok untuk ikut serta secara aktif pada kehidupan politik, diantaranya yaitu pada pemilihan pimpinan daerah maupun negara serta secara eksklusif maupun tidak langsung.¹⁸

2) Pemilihan

Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik.¹⁹

¹⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

¹⁹<https://www.britannica.com/topic/election-political-science> diakses pada tanggal 28Oktober 2021.

3) Kepala Desa

Kepala Desa adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina, dan mengembangkan desanya.²⁰

F. Kajian Terdahulu

1. Jurnal ilmiah karya Rina Rachman Oliy dkk, yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Pada Pilkada Kota Palu Tahun 2015*”. Penelitian ini menganalisa mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kota Palu. Pada kenyataannya, pendidikan dengan partisipasi politik sangat berkaitan erat. Namun masih ada beberapa masyarakat, yang tidak memahami proses pengambilan suara dalam pemilu.²¹
2. Jurnal Ilmiah karya Siti Qulsum dkk, yang berjudul “ *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026*”. Penelitian itu menjelaskan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat desa Purwasari dalam pemilihan kepala desa, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa masih sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat

²⁰Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), h.1.

²¹Rina Rachman Oliy, dkk, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Pada Pilkada Kota Palu Tahun 2015*”, (EDU CIVIC Jurnal Untad, 2018),h.43.

dalam penelitian ini yaitu pemilih yang memperoleh hak pilih justru tidak menggunakan hak pilihnya dan masih terdapat masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada datang untuk memilih.²²

3. Jurnal ilmiah karya Ni Ketut Arniti, yang berjudul “*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar*”. Penelitian ini membahas mengenai peta partisipasi pemilih dalam pileg dan pilpres di Kota Denpasar mengalami perubahan. Dalam pemilu, upaya sosialisasi politik juga termasuk ke dalam salah satu hal yang penting. Menurut Friedmen dan Hechter terdapat pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik, Contohnya yaitu tokoh agama, calon legislatif, dan lain sebagainya. Hubungan antara calon kandidat dengan masyarakat, juga menjadi salah satu faktor dalam perolehan suara tersebut.²³

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian yang dilakukan Rina Rahman oli dilatarbelakangi tingkat pendidikan yang sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi politik, Sedangkan penelitian yang saya lakukan dilatarbelakangi kesadaran masyarakat dalam mempengaruhi partisipasi berpolitik. Penelitian yang dilakukan Siti Qulsum memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, namun pada penelitian tersebut permasalahannya berasal dari Sumber Daya Manusia yang kurang maksimal. Penelitian yang dilakukan Ni Ketut Arniti membahas peta partisipasi dalam Pileg dan Pilpres, sedangkan penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam Pilkades.

²²Siti Qulsum, dkk, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026*, (Jurnal Unsil Vol .06 No.02, 2020), h.102.

²³Ni Ketut Arniti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Umum Legislatif Kota Denpasar*, (Jurnal Dinamikallmu Sosial Vol.4 No.2, 2020), h. 346.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada sebuah objek maupun subjek yang ilmiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci atau kunci utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, serta pada penelitian kualitatif lebih menekankan makna asal di generalisasi.²⁴

Metode kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena yang ada dalam subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan lain-lain.²⁵

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, PRA yaitu pendekatan partisipatoris yang merupakan cara berpikir panjang atau implementasi, dan pendekatan, yang berkaitan dengan konsep pembelajaran yang fleksibel di lapangan, nilai penting dari observasi-partisipasi, pentingnya pendekatan, perbedaan cara pandang etik antara peneliti dengan masyarakat/partisipan, serta validitas dari pengetahuan lokal.²⁶

PRA merupakan metode penelitian yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam PRA, masyarakat desa berperan aktif dalam pemetaan masalah sosial dan penyebabnya, peta jalan untuk memecahkan masalah, dan kemudian

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 213.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

²⁶Robert Chambers, *The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal*, (World Development Vol.22 No.7, 1994), h. 955.

menuangkan menjadi program, dukungan anggaran, serta implementasi pada kerja sama, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat.²⁷

2. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi pemilih pada pilkades. Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 Kepala Dusun, 1 Staf kantor Kepala Desa dan 4 Masyarakat yang berada di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20361.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian yaitu di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Agar memfokuskan penelitian penulis membatasi hanya 5 dusun untuk diteliti yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu suatu analisis data yang bersifat induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Kemudian berdasarkan hipotesis tersebut, maka dicarikan data lagi hingga dapat disimpulkan

²⁷Hidayana dkk, *Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul*, (Departemen Antropologi UGM, Vol.2 No.2, 2019), h. 102.

kebeneran dalam hipotesis tersebut.²⁸ Pada penelitian ini, peneliti memakai 2 sumber data yaitu :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui hasil wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti.²⁹ Narasumber yang nantinya akan diwawancarai oleh peneliti yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Staf Kantor Kepala Desa dan Masyarakat yang berada di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20361.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung.³⁰ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi dan undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a) Observasi

Observasi yaitu sebuah dasar penelitian, yang mempelajari tentang perilaku dan makna nya. Metode tersebut digunakan secara langsung

²⁸Robert Chambers. *The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal*, (World Development, Vol.22 No.7, 1994), h. 335.

²⁹Robert Chambers. *The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal*, (World Development, Vol.22 No.7, 1994), h. 335.

³⁰Robert Chambers. *The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal*, (World Development, Vol.22 No.7, 1994),h. 213.

dalam mengamati peristiwa atau fenomena yang terdapat dalam fokus penelitian.³¹

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian.³²

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³³ Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data tertulis dari Kantor Kepala Desa Marindal I sehingga peneliti dapat menemukan data penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Umumnya, pembahasan skripsi di rangkai menjadi lima bab, yang bertujuan untuk memberikan batasan pembahasan yang di paparkan oleh penulis dengan mengikuti struktur umum penelitian ilmunan. Adapun struktur dan isi penelitian tersebut adalah:

BAB I : Pada bab ini merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini dijadikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.297.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 304.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 314.

istilah, kajian terdahulu, metode penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian, subjek dan informan penelitian, lokasi penelitian, analisis data, teknik pengumpulan data, serta menjelaskan tentang sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab ini merupakan landasan teori yang dimana membahas tentang partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik, tipologi partisipasi politik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, Pemilihan kepala desa, serta Tugas dan Wewenang Kepala Desa.

BAB III : Pada bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian meliputi: sejarah desa, visi misi desa, letak geografis, keadaan demografi, keadaan ekonomi, pendidikan, agama dan struktur organisasi.

BAB IV : Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh, meliputi: Pengertian partisipasi berpolitik, bentuk-bentuk partisipasi berpolitik dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi berpolitik masyarakat serta nilai dari partisipasi berpolitik masyarakat Desa Marindal I.

BAB V : Penutup, yaitu bab yang memuat kesimpulan dalam hasil penelitian dan saran menjadikan pondasi dalam penyempurnaan penelitian dalam skripsi, dan penutup yang terakhir dari skripsi adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.